

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bermakna menyerahkan hak, wewenang, serta kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Konteks otonomi daerah ini dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam pengertian normatif Daerah otonom di dalam otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom dalam menjalankan wewenangnya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri merupakan tanggung jawab yang utama, terutama mengenai kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah menjadi unsur penting di dalam daerah otonom sebagai yang mengatur dan memikirkan nasib masyarakatnya karena pemerintah daerah memiliki posisi terdekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengetahui dengan nyata dan jelas kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian pemerintah daerah menjalankan sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya dalam otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka otonomi daerah bertujuan untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

Pemerintahan Daerah secara konsep dijelaskan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan di tingkat terendah. Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintahan desa di pimpin oleh Kepala Desa. Pemerintahan Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mendamaikan perselisihan desa serta menentukannya sebagai perubahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berkaitan dari uraian tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi pada Paragraf II mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, pasal 36 menjelaskan tentang Pemerintahan Desa yaitu :

1. “Kelurahan/Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan/Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan/Pemerintahan Desa;

- b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelurahan/Pemerintahan Desa melakukan koordinasi dengan kecamatan dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya”.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa salah satu dari tugas Pemerintahan Desa ialah pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan telah menjadi perhatian yang mendalam pada kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat lemah dan kurang beruntung. Pemberdayaan mengandung makna sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa sebagai pemimpin di desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh melalui proses pemberdayaan di tingkat desa. Melalui pemberdayaan masyarakat dapat

membangun kemandirian dan prestasi terutama dalam perekonomian pada kemampuan masyarakat. Dengan demikian, upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama idealnya dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat tersebut dapat berkembang.

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat terdiri dari 7 desa yang masing-masing desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Desa Sukadanau merupakan salah satu desa di Kecamatan Cikarang Barat dengan wilayah terdiri dari wilayah pemukiman dan wilayah industri. Di era globalisasi ini masyarakat harus mempunyai keahlian dan mampu bersaing dalam bidang ekonomi khususnya industri. Lahan-lahan sawah di Desa Sukadanau sebelum berkembangnya industri cukup luas, namun dengan masuknya industri yang terus berkembang menghabiskan lahan sawah yang ada di Desa Sukadanau. Masyarakat Sukadanau yang mayoritas petani kini beralih profesi menjadi beberapa profesi, diantaranya ialah ada yang bekerja sebagai tukang ojek, membuka usaha warung, usaha galon, dan sebagainya.

Kemampuan masyarakat yang hanya mampu bertani idealnya dikembangkan agar tetap dapat mensejahterakan hidupnya dan meningkatkan perekonomiannya dalam segala bidang. Masyarakat Desa Sukadanau sebaiknya di berdayakan agar kebutuhan hidupnya dapat terus terpenuhi, disinilah tugas pemerintah desa diharapkan dapat dijalankan. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat Desa Sukadanau yang tadinya hanya mempunyai kemampuan bertani, dapat mengembangkan kemampuannya mengikuti perkembangan jaman dan teknologi sesuai dengan potensi yang ada di daerah Sukadanau.

Pemberdayaan masyarakat dimungkinkan banyak variabel yang perlu diperhatikan agar terlaksana dengan baik. Salah satunya ialah partisipasi masyarakat, keefektifan dan keefesienan pelaksanaan tugas aparatur desa merupakan indikator yang diduga dapat mewujudkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai program yang dijalankan oleh desa, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat, dan kepemimpinan Kepala Desa merupakan unsur

terpenting dalam penyelenggaraannya. Melalui kepemimpinan yang baik dari Kepala Desa akan membuat tingginya partisipasi masyarakat dan meningkatnya semangat kerja pelaksana program desa sehingga dapat terciptanya masyarakat yang berdaya khususnya bidang ekonomi.

Fungsi yang diharapkan dari seorang Kepala Desa Sukadanau agar dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat dari kepemimpinannya yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan dari program pemberdayaan pada tingkat atasnya. Dalam era demokratisasi dan reformasi sejauh ini pengembangan perilaku kepemimpinan pemerintahan menuntut kelincihan dalam mengembangkan pendekatan yang bebas dan kecenderungan dominasi, serta berusaha mengarahkan orientasi kepada masyarakat luas dengan meningkatkan kepekaan untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang termasuk saran, tanggapan, keluhan bahkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan public. Masyarakat Desa Sukadanau memiliki keberagaman mata pencaharian, seperti diuraikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sukadanau 2025

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa/Orang)	Persen (%)
1.	Karyawan / Profesional		
	a. Pegawai Negeri Sipil	53	0,35
	b. TNI	4	0,02
	c. Polri	4	0,02
	d. Swasta	4.764	32,00
	e. Dokter	5	0,03
	f. Perawat	2	0,01
2.	Wiraswasta	1.276	9,00
3.	Tani	143	1,00
4.	Pensiunan	12	0,08
5.	Jasa	15	0,10
6.	Bidan	6	0,04
7.	Dukun Bayi	4	0,02
8.	Notaris	4	0,02
9.	Lain-lain	8.684	58,00
JUMLAH		14.976	100

Sumber : Data Monografi Desa Sukadanau, 2025

Berdasarkan keberagaman mata pencaharian masyarakat Desa Sukadanau, dapat dilihat tabel 1.1 bahwa mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah karyawan swasta dengan persentase sebesar 40%, wiraswasta sebesar 19%, Buruh memiliki persentase 14% dan lain-lain sebesar 23%, artinya banyak masyarakat Sukadanau yang bekerja di Industri sekitar pemukiman dan pekerjaan yang lainnya perlu di berdayakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sukadanau. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, serta melalui artikel-artikel dalam media masa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, serta kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya, permasalahan tidak dapat dipecahkan (Suriadi, 2005:56).

Pendekatan *top-down* tidak mengembangkan masyarakat untuk memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, di mana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai apabila masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain memiliki peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisis masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat

keputusan-keputusan, rencana-rencana, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran antara lain karena kurangnya pemberdayaan masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah:

- “
1. Pembangunan hanya mementingkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan.
 2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
 3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.
 4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan”.

(<http://www.pustakaonline.wordpress.com>)

Berkaitan dengan paradigma pembangunan di atas, maka implementasi penyelenggaraan pemerintahan mengindikasikan pola pemberdayaan masyarakat. Pada umumnya indikator pemberdayaan masyarakat meliputi : (1) membangun pola partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan; (2) adanya keberdayaan dalam pembangunan; (3) menumbuhkan kemandirian masyarakat, dan adanya keberlanjutan dalam pembangunan (*sustainable*). Pola pemberdayaan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan, seperti pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, maupun kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) masyarakat baik yang diselenggarakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Desa Sukadanau merupakan salah satu desa yang terletak diwilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Pada tahun anggaran 2025 Desa Sukadanau merencanakan program pemberdayaan masyarakat pada bidang fisik dengan berbagai kegiatan seperti pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Kegiatan Program Pembangunan Fisik Desa Sukadanau
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Periode tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan	Volume dan Anggaran		% Kegiatan (Realisasi)	Lokasi
		Volume	Jumlah		
1	Perbaikan jembatan gerbang desa	1,5 x 3 m	2,978,300	70%	Rt 01 Rw 08
2	Pemasangan pavin blok		1,500,000	100%	Rt 01 Rw 05
3	Pengerasan jalan lingkungan	250 x 1,5 m	22,408,700	65%	Rt 02 Rw13
4	Sarana dan prasarana PAUD	1 Paket	17,704,300	60%	Rt 01 Rw14
5	Pembangunan Lap. Serbaguna	19 x 8 m	11,702,300	80%	Rt 01 Rw 17
6	Saluran Air	80 m	6,589,000	100%	Rt 02 Rw15
7	Hotmik Manual	296 x 1,5 m	11,974,000	90%	Rt 01 Rw 01
8	Saluran air	110 m	9,937,000	100%	Rt 02 Rw 04
9	Rabat beton	100m	4,413,000	90%	Rt 01 Rw 11
10	Rutilahu	1 unit	9,800,000	100%	Rt 01 Rw 12
11	Drainase	100m	6,007,000	80%	Rt 01 Rw 11
		Jumlah	105.013.300	85 %	

Sumber: Kantor Desa Sukadanau, Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang Fisik terlihat bahwa realisasi pekerjaan rata-rata hanya mencapai 85 %. Berdasarkan pengamatan peneliti penyebab ketidaktercapaian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada bidang pembangunan fisik menurut dugaan penulis karena terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Pada kegiatan perencanaan program kegiatan pembangunan fisik Pemerintah Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tidak pernah mengikutsertakan masyarakat untuk merencanakan program-program apa saja yang akan dikerjakan, semua program pembangunan fisik berasal dari pemerintah desa sendiri, hal ini disampaikan oleh Bapak Sujito salah seorang anggota BPD dalam wawancara pada tanggal 16 Oktober 2025 dikatakan : “ dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat

bidang Fisik kami selaku wakil masyarakat tidak pernah diajak dalam perencanaan pembangunan fisik tersebut “. Disamping itu berdasarkan pengamatan penulis masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa, di mana yang mengerjakan proyek pembangunan di desa tersebut adalah pemborong yang berasal dari daerah lain.

2. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik berdasarkan pengamatan penulis masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa, di mana yang mengerjakan proyek pembangunan di desa tersebut adalah pemborong yang berasal dari daerah lain. Sikap pemerintah desa yang tidak peduli terhadap masyarakat dalam pembangunan desa akan mematikan tradisi gotong royong masyarakat desa dan menjadikan masyarakat merasa tidak ikut memiliki dalam pembangunan yang dilakukan sehingga kemungkinan pembangunan tersebut akan cepat rusak karena tidak ada rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap pembangunan fisik yang sudah dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Darmawan Ketua RW 07 dalam wawancara pada tanggal 17 Oktober 2025 dikatakan : “ masyarakat memang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik, masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak melakukan aktivitas apapun “.
3. Informasi dan sosialisasi rencana pembangunan fisik yang kurang optimal, dan hal ini mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui rencana pembangunan fisik tersebut sehingga kemungkinan sikap masyarakat kurang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut, seperti menarik pungutan kepada pelaksana proyek. Hal ini diperkuat oleh Bapak Muhidin salah satu tokoh masyarakat Desa Sukadanau dalam wawancara pada tanggal 18 Oktober 2025, dikatakan : “ tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kegiatan pembangunan fisik, masyarakat tahu ada kegiatan pembangunan pada waktu pelaksanaan saja “.

Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian, dengan judul: “ **Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan Fisik di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas terdapat identifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan fisik di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang fisik?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang fisik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan fisik di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang fisik.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja dalam mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang fisik.

1.4 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah hal yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, berguna sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah, dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pemberdayaan masyarakat.

- b. Bagi pemerintah Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memberdayakan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.
- c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi 2 (dua) yang terdiri signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman, tidak terlepas dari tema penelitian yaitu tentang pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Supartini 2012 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Potensi Desa Ketingen Kabupaten Sleman di Yogyakarta, memperoleh kesimpulan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh LKMD Ketingen adalah dengan membentuk organisasi desa wisata. Dalam meningkatkan dan mengembangkan kegiatan warga, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil seperti kelompok ternak kandang ngudi lestari, kelompok simpan simpan amanah rukun abadi, kelompok bakul kecil rumaket, kelompok usaha bersama amanah. Faktor pendukung yang menunjang dalam pengembangan desa wisata ketingen antara lain: papan informasi dan peta wisata yang dapat memandu wisatawan, SDM yang banyak dan berkualitas, dan SDA yang indah dan subur, serta potensi seni dan budaya. Faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata ketingen meliputi sumberdaya manusia sendiri, pendanaan dan kerukunan serta kepengurusan yang kurang maksimal. Penelitian ini terdapat persamaan dalam metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan menggunakan analisa data secara deduktif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan diantaranya tenaga pendamping desa, pengurus koperasi, lembaga sosial, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat. Penelitian ini memiliki hubungan yang sama dalam pengembangan potensi desa, tetapi dalam penelitian ini, pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Strategi pengembangan BUM Desa berupaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dikelola desa dengan tepat dan berdaya untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekowisata pelestarian alam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rakib dan Agus Syam 2016 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Life Skills Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, memperoleh kesimpulan bahwa adanya program life skills dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memproduksi ikan asin (kering) dan minyak kelapa fermentasi yang higienis dan berkualitas di desa Lero. Meningkatnya 34 kesadaran masyarakat nelayan dalam mewujudkan swadana dan swadaya dalam mengembangkan kelompok unit usaha kecil/ rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, memiliki kesamaan menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini melalui angket, dan wawancara yang diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan program life skills tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal. Untuk itu, program life skillshanya difokuskan pada pengolahan ikan asin yang bervariasi rasa. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada pemberdayaan untuk mengembangkan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Suciati Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Social Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009, dengan judul pemberdayaan kelompok industry rumah tangga emping garut di desa

kunti, kecamatan andong, kabupaten boyolali. Penelitian ini membahas tentang strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak pemberdaya yang ditambah dengan adanya pemberdayaan indicator pemberdayaan kelompok pada akhirnya mampu mengubah wawasan dan pendapatan kelompok sehingga dinamika perekonomian mereka bisa berkelanjutan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Nurdiyanto dengan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Social Fakultas Dakwah Dan Komikasi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 yang berjudul ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata’ penelitian ini membahas tentang pembangunan pariwisata yang berhasil jika dilakukan dengan membangun partisipasi masyarakat untuk membangun sebuah desa wisata yang ada di kabupaten gunung kidul.⁹ Adapun penelitian yang Dilakukan oleh peneliti adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui pengembangan desa wisata (studi kasus Desa Wonokarto Kec. Sekampung. Kab. Lampung Timur). Hal ini yang membedakan anantara penelitian yang pertama adalah penelitian pertamana melakukan pemberdayaan home industry rumah tangga bukan di desa wisatanya dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama tentang pemberdayaan masyarakat. Penelitian kedua kaitanya dengan penelitian adalah tentang adanya pengembangan desa wisata yang dilakukan di kabupaten gunung gidul. Perbedaan dari penelitian tersebut tentang pengembangan desa wisata dan bagaiman langkah yang harus dilakukan (Desa Wonokarto Kec, Sekampung Kab. Lampung Timur). Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui pengembangan Desa Wisata (studi kasus Desa Wonokarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).
5. Penelitian oleh Ahmad, Abdul Mahsyar, Anwar Parawangi tahun 2021 dengan judul penelitian : Implementasi Program Pemberdayaan program pemberdayaan masyarakat dan Koordinasi lintas wilayah merupakan ciri Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan hasil penelitian program pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dengan pendekatan sintesis top-down dan bottom-up.

6. Penelitian oleh Sri Daryanti Topuh, Joice J Rares, Burhanuddin Kiyai (2014) dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe (Suatu Studi Pada Simpan Pinjam Perempuan). Hasil penelitian Kegiatan Pemberian Permodalan Belum Sepenuhnya Di Berikan Kepada Rumah Tangga Miskin, Kurangnya Pelatihan Kepada Kelompok-Kelompok Pemanfaat Dalam Mengelola Usaha Sehingga Sebagian Besar Dari Anggota Kelompok Usahanya Tidak Berkembang (Gagal) Dan Kurangnya Anggota Pihak UPK.
7. Penelitian oleh Basri (2020), dengan judul Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3md) Melalui Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Hasil penelitian Terdapat Beberapa Kegiatan Yang Belum Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Desa.
8. Penelitian oleh Teguh Aris Munandar, dan Darmawan (2020), dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang. Hasil penelitian Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) Yang Diterapkan Mulai Februari 2015, Mampu Memperbaiki Kehidupan Nelayan, Dalam Bentuk Budidaya Rumput Laut Di Desa Lontar Kabupaten Serang. Program seribu kampung nelayan yang berfokus kepada peningkatan hidup para Nelayan yang mana telah mampu memperbaiki kehidupan Nelayan.
9. Penelitian oleh Agus Triyono¹⁾, Dian Purworini²⁾, Marendra Murti P (2016), dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Masyarakat Gunung Kemukus Kabupaten Sragen. Hasil penelitian Melalui

Komunikasi Pembangunan Pemberdayaan Yang Dilaksanakan Di Lokasi Wisata Gunung Kemukus Telah Berjalan Dengan Cukup Baik. Dilaksanakan Atas Kerja Sama Antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sragen.

10. Penelitian yang di lakukan oleh Triaturrahman (2015-2016), dengan judul Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara, Adapun hasil penelitian atau pembahasan Hasil pembahasan dari Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara Tahun 2015-2016 sudah dilakukan dengan baik, namun pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Adat di Bayan, lebih cenderung bersifat umum, karena BUMDES yang dibentuk di desa Bayan masih baru, jadi butuh waktu sehingga dapat berkembang yang menjamah ke ranah usaha yang mengarah pada potensi yang dimiliki. Selain itu juga BPMPPKBPEMDES masih mengalami kekurangan SDM yang menjadikan kendala dalam percepatan pengembangan BUMDES. Persamaan penelitian dengan peneliti sekarang persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian dengan peneliti sekarang terletak pada fokus penelitian dimana indikator penelitian terdahulu ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat Adat di Bayan, karakteristik lembaga pemerintahan Desa dan kepatuhan dan respon pelaksanaan kebijakan, sedangkan peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator perana pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Adat di Desa Salut Kecamatan Kanyangan Lombok Utara, yang dimana pengembangan usaha, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan berdampak pada percepatan pembangunan Ekonomi Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka sangat perlu dikemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagaimana uraian berikut. Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian pokok skripsi ini dibagi dalam lima bagian. Bagian pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, signifikasi penelitian serta sistematika penulisan.

Bagian kedua landasan teori diawali dengan tinjauan pustaka yang mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. selanjutnya kerangka teoritis yang dimulai dengan tinjauan teoritik mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat desa yang 7 mencakup: pengertian pemberdayaan masyarakat, pengertian desa, model-model pemberdayaan, strategi pemberdayaan masyarakat, visi dan misi pemberdayaan masyarakat desa, program-program pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa kerangka pemikiran dan definisi operasional.

Bagian ketiga merupakan metode penelitian berisi uraian mengenai tempat dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, sumber data, sampling, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

Bagian keempat berisi hasil penelitian yang berisi uraian meliputi: deskripsi lokasi penelitian, deskripsi permasalahan penelitian, serta temuan studi yang dihubungkan dengan kajian teori.

Bagian terakhir berupa kesimpulan, implikasi, saran-saran, juga disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar ralat.